

PEMBERITAAN MEDIA

**EDISI
20 - 26 April 2020**

LULUK'S UPDATE

**MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULİYAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI**



Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru

Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Tahun 2020 Periode I Telah Ditetapkan

- Pada 23 April 2020 KLHK menerbitkan SK Menteri LHK Nomor SK.851/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2020 tertanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Hutan Alam Primer dan lahan gambut 2020 Periode I.
- Ini tindak lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
- Serta melaksanakan perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut, yang telah berlangsung sebagai upaya penurunan emisi dari deforestasi, dan degradasi hutan.

Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Tahun 2020 Periode I Telah Ditetapkan

- ❑ PIPPIB Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode I disusun berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2019 dengan mengakomodasi pemutakhiran data enam bulan terakhir, di mana terjadi penambahan luas areal PIPPIB sebesar 314.300 ha.
- ❑ Perubahan data terjadi karena adanya masukan data konfirmasi perizinan yang terbit sebelum Inpres Nomor 10 Tahun 2011, pemutakhiran data perizinan, perubahan tata ruang, pemutakhiran data perubahan peruntukan, hasil survei lahan gambut, dan survei hutan alam primer.

Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Tahun 2020 Periode I Telah Ditetapkan

- ❑ Sehingga hutan alam primer dan lahan gambut yang dijaga dan tidak boleh ditransfer untuk kegiatan lain menjadi seluas **66,3 juta ha**.
- ❑ Sebelumnya pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
- ❑ Ini tindak lanjut dan penyempurnaan dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013, dan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Tahun 2020 Periode I Telah Ditetapkan

- Dengan terbitnya SK Menteri LHK Nomor SK.851 ini, maka kepada gubernur dan bupati/wali kota dalam menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru wajib berpedoman pada lampiran PIPPIB Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode I.
- Terhadap instansi pemberi izin kegiatan yang termasuk dalam pengecualian pada PIPPIB wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan setiap enam bulan sekali.

Luas Hutan Indonesia Dan Angka Deforestasi

Luas Lahan Berhutan Indonesia 94,1 Juta Ha

Data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK

- hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2019 menunjukkan luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta ha atau 50,1% dari total daratan.
- Dari jumlah tersebut, 92,3% dari total luas berhutan atau 86,9 juta ha berada di dalam kawasan hutan

Luas Lahan Berhutan Indonesia 94,1 Juta Ha

- ❑ Tren deforestasi Indonesia relatif lebih rendah, dan cenderung stabil.
- ❑ **Deforestasi netto tahun 2018 -2019**, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Indonesia sebesar **462.400 ha**.
- ❑ Angka ini berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 465.500 ha dengan dikurangi angka reforestasi (hasil pemantauan citra satelit) sebesar 3.100 ha.
- ❑ **Luas deforestasi tertinggi** terjadi di kelas **hutan sekunder**, yaitu **162.800 ha**, di mana 55,7% atau 90.600 ha berada di dalam kawasan hutan dan sisanya seluas 72.200 ha atau 44,3% berada di luar kawasan hutan.

Luas Lahan Berhutan Indonesia 94,1 Juta Ha

- Sebagai pembandingan, hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2018 menunjukkan **deforestasi netto tahun 2017-2018** baik di dalam dan di luar kawasan **hutan Indonesia** adalah sebesar **439.400 ha**
- Angka ini berasal dari **deforestasi bruto 493.300 ha** dikurangi **reforestasi** (hasil pemantauan citra satelit) **53.900 ha**.
- Dengan memperhatikan hasil pemantauan tahun 2018 dan 2019, **secara netto deforestasi Indonesia tahun 2018-2019** naik **5,2%**, namun **deforestasi bruto** menurun **5,6%**.

Luas Lahan Berhutan Indonesia 94,1 Juta Ha

- ❑ Tutupan hutan yang berkurang 462.400 ha pada 2019 ini karena beberapa faktor mulai dari konversi hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
- ❑ kondisi penutupan lahan dan hutan Indonesia bersifat dinamis, seiring dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kegiatan lainnya.
- ❑ Perubahan tutupan hutan, terjadi dari waktu ke waktu, di antaranya karena konversi hutan untuk pembangunan sektor non kehutanan, perambahan, dan kebakaran hutan.
- ❑ Sesuai perkembangan teknologi, perhitungan luas deforestasi sejak periode 2011-2012 merupakan hasil perhitungan deforestasi netto yang sudah mempertimbangkan kegiatan reforestasi. Sementara perhitungan pada periode sebelumnya masih menggunakan deforestasi bruto.

Luas Lahan Berhutan Indonesia 94,1 Juta Ha

Upaya yang dilakukan KLHK:

- ❑ penerapan Inpres Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut,
- ❑ Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan,
- ❑ Pengendalian Kerusakan Gambut,
- ❑ Pengendalian Perubahan Iklim,
- ❑ Pembatasan perubahan Alokasi Kawasan Hutan untuk sektor non kehutanan (HPK),
- ❑ Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH/TORA),
- ❑ Pengelolaan Hutan lestari,
- ❑ Perhutanan Sosial,
- ❑ Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Luas Lahan Berhutan Indonesia 94,1 Juta Ha

- Untuk mengetahui keberadaan dan luas tutupan lahan baik berhutan maupun tidak berhutan, baik di dalam kawasan hutan (hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi) maupun di luar kawasan hutan (areal penggunaan lain), KLHK melakukan pemantauan hutan dan deforestasi setiap tahun.
- Pemantauan hutan dan deforestasi dilakukan pada seluruh daratan Indonesia seluas **187 juta ha**, baik di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan, dan berdasarkan penyesuaian terhadap peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang terdapat dalam program Kebijakan Satu Peta (KSP).
- Pemantauan menggunakan citra satelit LAPAN, dan diidentifikasi secara visual oleh tenaga teknis penafsir KLHK yang tersebar di seluruh Indonesia.

Luas Lahan Berhutan Indonesia 94,1 Juta Ha

Tanggapan **Walhi** atas data deforestasi tersebut

- ❑ upaya menekan kerusakan hutan tidak bisa dilihat dari luasan hutan secara administratif.
- ❑ Pemerintah, harus membuktikan bahwa alih fungsi lahan hutan, misalnya untuk perkebunan, tidak menyumbang kerusakan lingkungan.
- ❑ Penting untuk dilihat apakah kemudian luas penambahan kawasan [deforestasi] itu berbanding lurus dengan tingkat dan dampak kerusakan hutan
- ❑ Menurut temuan pihaknya dan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), kerusakan lingkungan didominasi oleh sektor perubahan tata guna lahan.

Luas Lahan Berhutan Indonesia 94,1 Juta Ha

- ❑ Di sektor ini ada tiga industri yang berperan besar, yakni perkebunan, kehutanan dan tambang.
- ❑ Karena sampai akhir 2019 pada luasan daratan, 61,4 persen itu sudah menjadi kawasan konsesi, baik swasta maupun BUMN
- ❑ Sayangnya, pemerintah belum mengungkapkan detail data tersebut.
- ❑ Pun dalam hal penindakan terhadap korporasi yang memicu kebakaran lahan.
- ❑ Ini diperparah dengan rancangan perundangan yang memudahkan izin perusahaan yang bisa merusak lingkungan.



Target Nationally Determined Contribution (NDC)

Kementerian Keuangan Menawarkan Konsep Anggaran Baru Atasi Perubahan Iklim

- ❑ Kementerian Keuangan meningkatkan target NDC menjadi 29 persen dengan pendanaan APBN atau APBD serta 41 persen dari bantuan internasional di tahun 2030.
- ❑ Kenaikan target ini akan diikuti oleh pendekatan penganggaran berbasis kinerja, yaitu melalui kerangka Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE).
- ❑ Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa Peningkatan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat merupakan faktor katalis dalam hal pengendalian perubahan iklim, khususnya di aspek tata kelola maupun pendanaan

Kementerian Keuangan Menawarkan Konsep Anggaran Baru Atasi Perubahan Iklim

- Dikutip dari laman resmi The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), NDC merupakan inisiatif jangka panjang dalam Paris Agreement, sebagai upaya masing-masing negara mengurangi emisi nasional dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Paris Agreement pun kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan persetujuan pada 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat. Di tahun yang sama, Indonesia pun menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement.

Kementerian Keuangan Menawarkan Konsep Anggaran Baru Atasi Perubahan Iklim

- ❑ Pendekatan TAPE TAKE ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- ❑ Melalui mekanisme TAPE dan TAKE, setiap kabupaten atau desa akan memiliki peluang mendapatkan alokasi bantuan keuangan provinsi atau Alokasi Dana Desa (ADD) kabupaten yang lebih besar dibandingkan kabupaten atau desa lainnya.
- ❑ Perbedaan alokasi anggaran ini akan ditentukan berdasarkan indikator kinerja ekologis yang telah disepakati. Baik itu dalam peraturan gubernur atau peraturan bupati yang menjadi dasar pengalokasian.

Kementerian Keuangan Menawarkan Konsep Anggaran Baru Atasi Perubahan Iklim

- ❑ Tambahan anggaran dari Kemenkeu ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya mengatasi dampak kerusakan lingkungan hidup dan perubahan iklim yang terus terjadi setiap tahunnya.
- ❑ Sebab dalam hitungan pemerintah, hingga tahun 2050 nanti, kerugian ekonomi yang muncul dalam dua dekade terakhir sudah mencapai kisaran 1,4 persen nilai PDB saat ini

Kementerian Keuangan Menawarkan Konsep Anggaran Baru Atasi Perubahan Iklim

- ❑ Selain mekanisme TAPE TAKE, dukungan pendanaan perubahan iklim dari luar Indonesia seperti Green Climate Fund (GCF) juga diharapkan mampu dimanfaatkan oleh daerah sebagai alternatif pembiayaan non-publik.
- ❑ Pemrakarsa proyek perubahan iklim nasional dapat mengajukan proposal pendanaan GCF kepada BKF setiap saat.

Kebakaran Hutan dan Lahan

Meski Pandemi Covid-19, Karhutla Tetap Jadi Prioritas

- ❑ Memasuki musim kemarau pada Juni-Juli berdasarkan analisa BMKG, kebakaran hutan dan lahan tetap menjadi ancaman serius.
- ❑ Meski saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19, namun KLHK tetap mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan menyiagakan tim.
- ❑ Menteri LHK menegaskan, antisipasi terjadinya karhutla tetap menjadi prioritas pemerintah.
- ❑ Berdasarkan analisis BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Juni-Juli, terutama pada wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

Meski Pandemi Covid-19, Karhutla Tetap Jadi Prioritas

- ❑ Tim satgas lapangan ini tidak hanya bekerja di titik terdepan saat terjadi karhutla, namun juga rutin turun melakukan sosialisasi bahaya karhutla dan penyebaran Covid-19 secara door to door ke masyarakat.
- ❑ Kepala BMKG mengungkapkan, Indonesia pada tahun ini mengalami El Nino Netral dengan tingkat kekeringan pada musim kemarau lebih tinggi dibandingkan normalnya.
- ❑ Awan hujan masih tersedia sekitar bulan April-Mei, sehingga ini waktu yang paling tepat untuk menyelenggarakan TMC (Tekhnologi Modifikasi Cuaca) pada beberapa provinsi rawan karhutla untuk mengisi embung dan membasahi gambut

Meski Pandemi Covid-19, Karhutla Tetap Jadi Prioritas

- ❑ Kepala BPPT mengungkapkan, pelaksanaan TMC akan lebih efisien apabila menggunakan pesawat berkapasitas besar milik TNI.
- ❑ BPPT sudah melaksanakan TMC di Riau sebanyak 27 sorti, menghasilkan hujan hampir setiap hari dengan volume 97,8 juta M3, sehingga titik panas di Riau pernah berkurang hingga nihil. Namun tantangan karhutla di Riau masih sangat besar saat nanti datang musim kemarau.
- ❑ Selain itu, mengupayakan TMC untuk pembasahan lahan gambut akan dilaksanakan awal Mei di lokasi yang teridentifikasi berulang kali terjadi karhutla yaitu Riau (Bengkalis, Pelalawan), Sumatera Selatan (Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir), dan Jambi (Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur).

Meski Pandemi Covid-19, Karhutla Tetap Jadi Prioritas

- ❑ Selanjutnya berkoordinasi dengan para pihak untuk melaksanakan TMC, mengaktifkan sektor swasta, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tani hutan untuk upaya pencegahan pembukaan lahan tanpa membakar.
- ❑ Hal terpenting lainnya, memberikan peringatan yang lebih tegas kepada pemegang izin yang lokasinya secara berulang terjadi karhutla.
- ❑ Berdasarkan Satelit Terra/Aqua (NASA) hotspot per tanggal 1 Januari-23 April 2020 sebanyak 737 titik. Sedangkan pada periode yang sama tahun 2019 jumlah hotspot sebanyak 1.177 titik. Artinya terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 440 titik atau 37,38 persen.

Karhutla di Riau Mencapai 19,7 Ha

- ❑ BNPB memantau karhutla di Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Dumai yang luasnya mencapai 19,7 Ha
- ❑ Hambatan pemadaman yaitu angin kencang, cuaca panas, lokasi kebakaran yang jauh hingga sulitnya sumber air
- ❑ Investigasi terkait penegakan hukum terhadap penyebab terjadinya kebakaran lahan dan pemiliknya masih dalam proses pihak kepolisian.
- ❑ Upaya pemadaman telah dilakukan berbagai pihak yang melibatkan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, perusahaan dan relawan.

Karhutla di Riau Mencapai 19,7 Ha

- Hingga 21 April terjadi di Bengkalis (2 titik) dan Kepulauan Meranti (1 titik)
- Di Dumai, pemadaman dan pendinginan berlangsung di satu titik, karhutla terjadi di Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sembilan Kota. Karhutla telah padam tetapi masih terlihat titik asap.
- Lahan terbakar di Bengkalis berada di Kecamatan Rupal, yaitu di Kelurahan Kapal Desa Darul Aman, Kelurahan Terkuk, Desa Dungun Baru dan Desa Teluk Lecah. Di wilayah Kabupaten Meranti, kebakaran di wilayah Desa Tanjung Gemuk dan Desa Repan. Keduanya berada di Kecamatan Rangsang.

Provinsi Sumsel Anggarkan Dana Rp 37 Miliar untuk Mencegah Karhutla

- ❑ BPBD Sumsel sedang memetakan daerah yang tergolong rawan karhutla
- ❑ Berdasarkan data karhutla beberapa tahun terakhir ada 10 kabupaten dari 17 kabupaten/kota Sumsel yang tergolong daerah rawan karhutla
- ❑ Daerah rawan karhutla itu yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Pali, Musirawas, Musirawas Utara, Ogan Komering Ulu (OKU), dan Kabupaten OKu Timur.

Provinsi Sumsel Anggarkan Dana Rp 37 Miliar untuk Mencegah Karhutla

- ❑ Pemerintah Provinsi Sumsel mengalokasikan dana sebesar Rp 37 miliar tahun ini, naik signifikan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 1,7 miliar. Adapun anggaran ini akan diperuntukan bagi sejumlah kabupaten dan kota yang berpotensi terdampak.
- ❑ Yaitu untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar Rp 6 miliar, Ogan Ilir Rp 5 miliar, Musi Banyuasin Rp 5 miliar, Banyuasin Rp 5 miliar, Muara Enim Rp 5 miliar, PALI Rp 5 miliar, Musi Rawas Rp 1 miliar, Muratara Rp 1 miliar, OKU Rp 2 miliar, dan OKU Timur Rp 2 miliar.
- ❑ Pemerintah berharap agar kejadian seperti tahun lalu tidak terulang, sebab Sumsel rawan karhutla karena memiliki lahan gambut terluas ke dua di Sumatera.

Provinsi Sumsel Anggarkan Dana Rp 37 Miliar untuk Mencegah Karhutla

- ❑ Gubernur dan kepala daerah kabupaten dan kota di Sumsel telah bersinergi dan berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan karhutla.
- ❑ Saat ini telah terbentuk tim terpadu pencegahan dan penanganan karhutla berdasarkan SK Gubernur yang diketuai langsung Sekretaris Daerah. Tim dibagi dalam 7 bidang program kerja.
- ❑ Selain itu, pihaknya juga telah bekerjasama dengan Ditjen Penegakan Hukum KLHK. Pemprov Sumsel juga telah melaksanakan sosialisasi penegakan hukum pada 180 unit usaha kegiatan terkait pencegahan, sanksi dan proses penegakan hukum karhutla.
- ❑ Pemprov Sumsel sudah melaunching aplikasi lancang kuning nusantara untuk monitoring penanganan karhutla

Gubernur Kalsel Petakan Daerah Rawan Karhutla di Kalimantan Selatan

- Gubernur Kalsel menginstruksikan jajarannya agar memetakan sejak awal daerah-daerah potensial terjadinya Karhutla, peralatan sehingga dapat mengantisipasi sedini mungkin kejadian karhutla dan meminimalisir terjadinya karhutla

KLHK Mengajukan Sita Eksekusi PT RKK Jambi

Sekilas Kasus Karhutla 2015 atas PT RKK Jambi

- ❑ Kebakaran lahan seluas 591 hektare terjadi di lahan PT PT Ricky Kurniawan Kertapersa (RKK) pada 2015 lalu. Atas kebakaran ini KLHK menggugat PT RKK secara perdata pada 14 Desember 2016. KLHK menggugat PT RKK dengan pasal yang bersifat strict liability pasal 88 UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- ❑ Pada peradilan tingkat awal ini majelis hakim menolak gugatan KLHK secara keseluruhan. PT RKK bebas dari gugatan dalam amar putusan majelis hakim pada 12 Juni 2017. Atas putusan itu, KLHK melakukan upaya hukum banding pada 20 Juli 2017.

KLHK Mengajukan Sita Eksekusi PT RKK Jambi

- ❑ Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jambi memenangkan KLHK pada tahap ini. Dalam amar putusan yang dibacakan pada 16 November 2017, PT RKK divonis membayar ganti rugi kerugian materil dan biaya pemulihan ekologis senilai Rp191.804.261.700.
- ❑ Setelah putusan itu, giliran PT RKK yang melakukan upaya hukum kasasi. Mahkamah Agung menolak gugatan PT RKK. Vonis kasasi dibacakan hakim pada 8 Oktober 2018.

KLHK Mengajukan Sita Eksekusi PT RKK Jambi

Update saat ini

- ❑ Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi KLHK terhadap PT RKK. Kasus ini telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hanya saja, eksekusi terhadap putusan tersebut belum dilakukan.
- ❑ Untuk melakukan eksekusi, Pengadilan Negeri Jambi sudah melakukan aanmaning. Kedua belah pihak, yakni KLHK dan PT RKK sudah dipertemukan. Namun, proses tersebut menemukan jalan buntu. Pihak perusahaan enggan melaksanakan putusan kasasi secara sukarela.
- ❑ Kemudian KLHK mengajukan sita eksekusi terhadap aset PT RKK tersebut. Ini berdasarkan atas putusan Mahkamah Agung yang menyatakan PT RKK bersalah atas kasus kebakaran lahan 2015 lalu. PT RKK kalah atas gugatannya di tingkat kasasi.

KLHK Mengajukan Sita Eksekusi PT RKK Jambi

- ❑ Putusan kasasi dijatuhkan pada 8 Oktober 2018, namun hingga saat ini PT RKK belum membayar ganti rugi kerugian materil dan biaya pemulihan ekologis senilai Rp 191.804.261.700 seperti tertuang dalam putusan hakim Pengadilan Tinggi Jambi di tingkat banding.
- ❑ Dalam amar putusan kasasi, majelis hakim menolak permohonan kasasi PT RKK. Dan menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500 ribu.
- ❑ Eksekusi merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jambi. KLHK sebagai penggugat sudah mengajukan permohonan eksekusi ke ketua PN Jambi dan sudah dilakukan aanmaning sebanyak dua kali.

KLHK Mengajukan Sita Eksekusi PT RKK Jambi

- ❑ Namun, PT RKK belum ada itikad baik untuk menyelesaikan putusan secara sukarela. Karenanya, KLHK mengajukan permohonan sita eksekusi ke Pengadilan Negeri Jambi. Sekaligus permohonan eksekusi.
- ❑ KLHK sudah menyampaikan data aset PT RKK ke ketua PN Jambi. Hanya saja, pihak PN masih meminta data pendukungnya.
- ❑ Pada dasarnya, untuk memperoleh data pendukung tersebut merupakan kewenangan pengadilan. Data pendukung aset baru bisa diperoleh atas permintaan penyidik atau pengadilan.

Sumber

- <https://www.antaraneews.com/berita/1440880/peta-indikatif-penghentian-pemberian-izin-baru-2020-ditetapkan-klhk>
- <https://www.berazam.com/read-1-121439-2020-04-23-klhk-tetapkan-peta-indikatif-penghentian-pemberian-izin-baru-tahun-2020-periode-i.html>
- https://sumsel.antaraneews.com/nasional/berita/1442872/klhk-pippib-untuk-perbaiki-tata-kelola-hutan-dan-lahan-gambut?utm_source=antaraneews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaraneews
- <https://news.trubus.id/baca/36445/klhk-tetapkan-peta-indikatif-penghentian-pemberian-izin-baru-tahun-2020>
- <https://news.okezone.com/read/2020/04/23/340/2203444/19-7-hektare-lahan-di-riau-terbakar>
- <http://www.koran-jakarta.com/luas-lahan-berhutan-seluruh-daratan-indonesia-94-1juta-ha/>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200424163615-20-497036/klhk-klaim-penebangan-hutan-berkurang-walhi-sindir-industri>
- <https://sumsel.antaraneews.com/berita/460892/tutupan-hutan-berkurang-462400-ha-pada-2019-akibat-konversi-lahan-karhutla>
- <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01371222/meski-pandemi-covid-19-antisipasi-karhutla-tetap-jadi-prioritas>
- <https://www.beritasatu.com/nasional/625243-menteri-lhk-antisipasi-karhutla-tetap-prioritas-di-tengah-pandemi-corona>
- <https://nasional.okezone.com/read/2020/04/25/337/2204624/menteri-lhk-pastikan-antisipasi-karhutla-tetap-prioritas-di-tengah-pandemi-corona>
- <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01371222/meski-pandemi-covid-19-antisipasi-karhutla-tetap-jadi-prioritas?page=2>
- <https://telusur.co.id/detail/meski-dilanda-covid19-klhk-tetap-fokus-atasi-karhutla>
- <https://id.investing.com/news/economy/kementerian-lhk-antisipasi-ancaman-karhutla-selama-pandemi-corona-1979451>

Sumber

- https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/8KyXj4xk-antisipasi-karhutla-tetap-prioritas-di-tengah-pandemi-korona?utm_source=desktop&utm_medium=terbaru&utm_campaign=WP
- <https://news.trubus.id/baca/36443/klhk-rancang-skala-prioritas-penanganan-karhutla-jelang-puncak-kemarau>
- <https://kumparan.com/urbanid/jelang-musim-kemarau-sumsel-anggarkan-rp-37-miliar-cegah-karhutla-1tI3iMKMHck/full>
- <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/04/26/paman-birin-mulai-petakan-daerah-rawan-karhutla-di-kalimantan-selatan>
- <https://kumparan.com/urbanid/jelang-musim-kemarau-sumsel-anggarkan-rp-37-miliar-cegah-karhutla-1tI3iMKMHck/full>
- <https://sumsel.antaranews.com/berita/461116/sumsel-petakan-daerah-rawan-kebakaran-hutan-dan-lahan>
- <https://www.jambi-independent.co.id/read/2020/04/25/50244/belum-ada-itikad-baik-pt-rkk/>
- https://bisnis.tempo.co/read/1335657/sri-mulyani-tawarkan-konsep-anggaran-baru-atasi-perubahan-iklim?page_num=2

LULUK'S UPDATE

**MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULIAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI**

**SETIAP SENIN
9.00 – 9.30 WIB**



@madaniberkelanjutan.id

Madani

